



# Membahayakan Permukiman Penduduk

## ■ Pagar Pembatas di Atas Talut Code Segera Dibongkar

### STORY HIGHLIGHT

- Bangunan di atas talut Code berupa pembatas pagar membahayakan karena menambah beban talut yang longsor
- Sebelum dibongkar, Satpol PP akan melayangkan surat pada pemilik bangunan pagar tersebut
- Pemkot juga masih menunggu koordinasi dengan BBWSO terkait bangunan di bawah dan menempel talut
- Bangunan-bangunan tersebut ditengarai melanggar sempadan sungai

TRIBUN JOGJA/AGUNG ISMIYANTO  
**LONGSOR** - Pemkot Yogya akan membongkar bangunan di atas talut yang longsor di Sungai Code. Bangunan berupa pembatas pagar tersebut dinilai membahayakan permukiman penduduk di bawahnya.

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas talut yang longsor di Sungai Code. Bangunan yang akan dibongkar berupa pembatas pagar tersebut dinilai berpotensi membahayakan bangunan di bawahnya, yakni permukiman penduduk.  
"Bangunan (pembatas pagar) atas memang sudah berbahaya karena sudah terlihat retak-retak. Apalagi, di bawah ada permukiman," kata Kepala Bidang Sumber

Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya, Aki Lukman Nur Hakim, Jumat (10/3).

Aki menambahkan, bangunan tersebut berpotensi membahayakan karena menambah beban talut yang longsor. Adapun, sebelum membongkar bangunan pembatas pagar tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya akan melayangkan surat pada pemilik bangunan pagar tersebut.

● ke halaman 14



## Membahayakan Permukiman

• Sambungan Hal 13

Sementara, pihaknya juga masih menunggu koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu dan Opak (BBWSSO) untuk bangunan yang berada di bawah talut dan bangunan yang menempel dengan talut. Pasalnya, bangunan di lokasi tersebut juga diduga melanggar sempadan sungai.

Pihaknya juga menambahkan, sejauh ini baru bisa melakukan koordinasi. Untuk penanganan, pihaknya sejauh ini berupaya untuk menyelamatkan infrastruktur terlebih dahulu. Dia juga menambahkan, perbaikan urung dilakukan lantaran berdasarkan surat dari balai besar wilayah sungai serayu

dan opak (BBWSSO) tertanggal 24 November 2017 tidak direkomendasikan adanya perbaikan.

Hal ini karena ada bangunan yang melanggar garis sempadan sungai.

Sementara, terkait bangunan di atas talut, juga ditengarai terjadi pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB). Hal itu diketahui setelah pihaknya menanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Aki menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan memang ada penambahan ruang di belakang bangunan yang tidak sesuai IMB yang diajukan di awal.

### Rembukan

Penjabat (Pj) Wali Kota, Sulistyono menjelaskan, pihaknya akan bermusyawarah dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait

pembongkaran bangunan di atas talut. Utamanya, pemilik bangunan perlu diajak berkoordinasi dalam upaya penyelesaian talut longsor.

"Kami fokus untuk menyelesaikan persoalan bangunan yang longsor terlebih dahulu. Pemilik bangunan yang longsor akan kita ajak bicara, dan pembongkaran tentunya menunggu rembukan," katanya.

Sulistyono mengaku sempat melihat bangunan yang berada di atas talut longsor memang cukup berbahaya. Seharusnya, kata dia, bangunan itu mundur atau lebih masuk, sehingga konstruksi talut jauh lebih kuat.

"Jika bangunan masih berdiri seperti ini, maka air masuk ke dalam tanah dan terus mengalir hingga ke bawah, sehingga mudah longsor," ulasnya.

Sejauh ini, kata Sulist-

yo, memang belum ada keputusan untuk merelokasi warga di bawah talut. Hanya saja, dia menyebut ada beberapa alternatif untuk warga terdampak mendapat tempat hidup ke depannya. Diantaranya adalah dengan rumah susun sewa sederhana (rusunawa). "Namun, belum ada rencana untuk relokasi," ulasnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogya, Nurwidhiartana mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya rencana pembongkaran bangunan di atas talut longsor tersebut. Akan tetapi, Nurwidi menjelaskan jika persoalan talut longsor ini bukan wewenang. Ada instansi terkait yang berwenang untuk membongkarnya. "Itu kan bencana, jadi pembongkaran bukan menjadi wewenang kami," katanya.

(ais)

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas PUPKP                         | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Sat Pol PP                          |              |        |                 |
| 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan |              |        |                 |

Yogyakarta, 09 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005